

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA DI DESA
SEMPERIUK A KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS**

Oleh:

SRI WAHYUNI*

NIM. E1012161087

Dr. Hj.Hardilina,M.Si², Dr.Erdi,M.Si²

*Email:sriwahyuni09@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Prograam Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana Didesa semperiuk A kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas. Permasalahan yang ada di Implementasi kebijakan ini adalah Rendahnya pengetahuan Aseptor dalam pemilihan metode kontrasepsi yang menyebabkan Tidak Berjalannya Program KB dalam penurunan angka kelahiran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ini bisa memperoleh informasi melalui teknik wawancara, observasi,dan dokumentasi. Teori yang digunakan Jones(dalamwidodo2006, 90) dimana ada tiga tahap yaitu : 1) Pengorganisasian. Pelaksanaan dalam pembinaan serta pelayanan yang masih atau kurang efektif; 2)Interprestasi. Masih kurang optimal sudah dilakukan namun kenyataannya dilapangan masih ada saja masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi; 3) Aplikasi, belum optimal karena belum dirasakan ketercapaian hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan keluarga berencana. Saran hasil penelitian adalah;1)perlu di tingkatkan pembinaan dan menciptakan pelayanan primer 2) perlu memberikan sosialisasi aseptor dan masyarakat umum tentang KB, 3)perlu adanya kerja sama antara suku melayu setempat karena berbenturan dengan agama setempat.

Kata kunci : Implementasi ,Kebijakan ,Keluarga Berencana.

IMPLEMENTATION OF FAMILY PLANNING PROGRAM IN SEMPERIUK VILLAGE, JAWAI SELATAN SUB-DISTRICT, SAMBAS REGENCY

By:

SRI WAHYUNI^{1*}

NIM. E1012161087

Dr. Hj. Hardilina, M.Si, Dr. Erdi, M.Si

Email: sriwahyuni09@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak

ABSTRACT

This research aimed to analyze the implementation of Family Planning Policy in Semperiuk Village, Jawai Selatan Sub-District, Sambas Regency. The problem in the implementation of this policy was the acceptors' low level of knowledge in choosing contraceptive methods resulting in the inoperability of the family planning program to reduce the birth rate. This research used descriptive research with qualitative approach. The researcher obtained information through interview, observation, and documentation techniques. The theory used was by Jones (in Widodo 2006, 90) where there are three stages, including 1) Organization. Implementation in coaching and services were still ineffective, 2) Interpretation. It had been suboptimal, but in reality there were still people who had not received dissemination. 3) Application. It had been suboptimal because it had not achieved results in accordance with the objectives of the family planning policy. It is suggested for the research that: 1) guidance needs to be improved and primary services need to be created 2) dissemination is needed for acceptors and the general public about family planning, 3) cooperation is needed between local Malay ethnicities because they clash with local religions.

Keywords: Implementation, Policy, Family Planning



ISI JURNAL MENCAKUP:

A. PENDAHULUAN	
1. Latar belakang Penelitian	4
2. Identifikasi Penelitian	5
3. Fokus Penelitian.....	5
4. Rumusan Masalah Penelitian	5
5. Tujuan Penelitian	6
6. Manfaat Penelitian	6
B. TINJAUAN PUSTAKA	6
C.METODE PENELITIAN.....	
D.HASIL PENELITIAN	13
1. Pengorganosasian	13
a. Pelaksanaan keluarga berencana	13
b. Standar operasional dan prosedur (SOP)	14
c. Sumber daya keuangan dan peralatan.....	14
a. Sumber daya keuangan.....	14
b. Sumber daya peralatan	14
d. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan.....	15
e. Penetapan Jadwal kegiatan.....	15
2. Interpretasi.....	15
1.Pemahaman kebijakan keluarga berencana	15
2.sosialisasi	16
3. Aplikasi.....	16
a.Pelaksanaan penerapan kebijakan keluarga berencana.....	16
b.kendala dan pelaksanaan terhadap keluarga berencana.....	17
E.PENUTUP	17
1. Kesimpulan.....	17
2. Saran	18
F.DAFTAR PUSTAKA.....	19

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian kebijakan pembangunan nasional di Indonesia yang sudah dimulai sejak BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang resmi berdiri melalui keputusan Presiden RI No.8 Tahun 1970 yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi, perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat, Realisasi dari pelaksanaan BKKBN memungkinkan adanya peran dan keterlibatan berbagai pihak. Dalam tugas promosi, BKKBN banyak melibatkan tokoh masyarakat dan pemerhati KB (Keluarga Berencana), sedangkan dalam pelayanan kontrasepsi, BKKBN senantiasa bekerja sama dengan kementerian kesehatan yaitu bidan sebagai tenaga kesehatan profesional.

Menurut Undang-Undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian pengarah mobilitas penduduk sehingga perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana serta sistem informasi keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 Penyelenggaraan program keluarga berencana adalah Proses, cara dan tindakan untuk melaksanakan program keluarga berencana untuk meningkatkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan dimasa depan yang sebagaimana telah dimaksudkan dalam Kebijakan Keluarga Berencana dalam pasal 18 yang berbunyi (1) mengatur kehamilan yang diinginkan adalah perempuan yang sudah menikah, kegagalan KB karena jumlah anak sudah banyak atau kondisi anak masih kecil.(2) menjaga kesehatan dan menurunkan angka kelahiran, (3) meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi,(4) meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga berencana serta

(5)memperomosisikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Angka Kelahiran kasar biasanya dinyatakan sebagai jumlah kelahiran bayi yang hidup per 1000 penduduk dalam satu tahun. Dalam ukuran *crude birth rate*(CBR) jumlah kelahiran tidak dikaitkan secara langsung dengan penduduk wanita melahirkan dengan penduduk secara keseluruhan.

Namun standar angka kelahiran dikatakan tinggi lebih dari 30 orang sedangkan standar kelahiran 20 orang. Dan standar rendah angka kelahiran kurang dari 20 orang pertahun. Angka kelahiran mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2016 sekitar 25 orang bayi yang lahir dan pada tahun 2017 berjumlah 30 orang dan tahun 2018 mengalami peningkatan lagi yang berjumlah sekitar 40 bayi dengan standar kelahiran 28 bayi/orang

Fenomena dari permasalahan anter sebut bisa dilihat dari tabel 1.1 dimana dari tabel menyatakan bahwa meningkatnya angka kelahiran dari tahun 2016-2018 dikarenakan rendahnya pengetahuan aseptor untuk memilih alat kontrasepsi sehingga tidak berjalanya program KB MKJP(metode kontrasepsi jangka panjang)seperti tubektomi(Kb permanen dilakuan dengan cara operasi) serta

kurangnya pembinaandan sosialisasi dari implemmentor.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka identifikasi masalah implementasi kebijakan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1. Tidak Berjalannya Program KB dalam penurunan angka kelahiran yang seharusnya memiliki anak tidak lebih dari dua (2) di Desa Semperiuk Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas yang di tunjukan dengan meningkatnya angka kelahiran dengan standar kelahiran
2. Rendahnya pengetahuan Aseptor dalam pemilihan metode kontrasepsi di Desa Semperiuk Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan pada Proses implementasi kebijakan Keluarga Berencana

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi kebijakan Keluarga Berencana di Desa Semperiuk A

Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu kebijakan publik serta sebagai satu penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik.
- b. Sebagai Bahan referensi dari peneliti lain yang akan melakukan analisis atau kajian dengan permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi dinas kependudukan keluarga berencana dan catatan sipil kabupaten sambas dalam membuat dan menyempurnakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, khususnya peserta KB yang masih muda, merumuskan tindakan tepat guna mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB, pengendalian PLKB terhadap

masyarakat diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui Keluarga Berencana di Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Konsep

a. Konsep Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah Suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarakm kehamilan dengan memakai kontrasepsi (manuba,2003). Keluarga Berencana menurut WHO adalah tindakan yang memakai individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak di inginkan dan kelahiran yang memang di inginkan mengatur interval diantara kehamilan, mengonrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. (Hanafi, 2004).

Menurut Who (2003) tujuan KB untuk menunda kehamilan bagi Pus (Pasangan usia subur) dengan usia istri kurang dari 20 tahun karena umur dibawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dulu.

2. Teori

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino 2008, 7). Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono 2005, 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do).

Adapun definisi lain mengenai kebijakan publik menurut Carl Friedrich (Agustino 2008,7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah "Serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan –kemungkinan (kesempatan-kesempatan)dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud".

Anderson (1984, 3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai ; serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dandilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Bridgeman dan Davis (dalam Anggara 2014, 36) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objektive), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis(hypothesis).Ada Pendapat lain mengenai kebijakan yaitu;

Menurut Mustopodidjaja (dalam Anggara 2004, 36) working definition yang diharapkan dapat mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan yang aktual bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 06) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai " keputusan

tetap' yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsisten pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintah. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model dan hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Berdasarkan berbagai definisi kebijakan publik menurut para ahli, dapat dilihat bahwa para ahli memberikan definisi yang beragam tentang kebijakan, namun pada intinya memiliki kesamaan yang menyangkut suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa perlu adanya tindakan dalam pemerintah untuk penanganan KB.

Sehubungan dengan beberapa pengertian diatas mengenai kebijakan publik, maka program Keluarga Berencana (KB) dapat dikatakan suatu kebijakan

publik karena KB merupakan salah satu upaya program pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah angka kelahiran yang berakibat pada ledakan penduduk yang dapat menghambat tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengendalikan angka kelahiran

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Winarto 2002, 29).

Implikasi dari pandangan ini maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif dan dekrit presiden) (Wahab, 2005).

Charles O' Jones (dalam Tangkilisan, 2003) menganalisis masalah kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Charles O' Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintah mengenai

program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan.

4. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Jones dalam buku (Joko Widodo 2006, 86) Implementasi sebagai *getting the done "and" doing it*. Pengertian tersebut adalah pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu implementasi kebijaksanaan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Menurut Charles O' Jones, Pelaksanaan menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu, lebih lanjut Charles O' Jones merumuskan implementasi sebagai *" a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done"*. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumberdaya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang

harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan Charles O' Jones tentang implementasi tersebut tidak kurang dari suatu tahap kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang merurutan. **Pertama**, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. **Kedua**, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Charles O' Jones dalam Gaffar (1997, 89-94), aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam antara lain :

1. *Organization; the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.* (Organisasi; pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode untuk memberlakukan kebijakan)
2. *Interpretation; the translation of language (often contained in a statute in acceptable and feasible plans and directives.* (Interpretasi; terjemahan bahasa (sering terkandung secara cerdas dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan layak).
3. *Application; the routine provision of service payment, or other agreed open objectives or instrument.* (Aplikasi; ketentuan rutin pembayaran layanan, atau

alat atau instrumen lain yang disepakati).

Berikut ini operasi mengenai proses implementasi suatu kebijakan publik yang mencakup tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap aplikasi.

1. Tahapan pengorganisasian (*to organized*)

Menurut Jones dalam (Widodo 2006,90) Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya. Penetapan anggaran yang diperlukan dari mana sumbernya, bagaimana menggunakannya dan mempertanggungjawabkan penetapan prasarana dan sarana apa yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.

a. Pelaksanaan Kebijakan (*policy implementor*)

Pelaksana kebijakan (*policy implementors*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan

dilaksanakan namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) dilingkungan pemerintah daerah
2. Sektor Swasta (private sectors)
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
4. Komponen masyarakat

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melakukan dan siapa saja yang melakukan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b. Standar Prosedur Operasional (*standard operating procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standard operating procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang diinginkan dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam sikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh

karena itu setiap program yang dibuat prosedur (protap) atau prosedur yang baku standar prosedur operasi dan standar pelayanan minimal (SPM).

c. Sumber daya Keuangan dan Peralatan

Besarnya anggaran melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat dan lain-lain.

Demikian pula dengan macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih menekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan

melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegiat, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku program untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai leading sector bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agarkinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari demensi proses pelaksanaan kebijakan, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan.

2. Tahap interpretasi (interpretation)

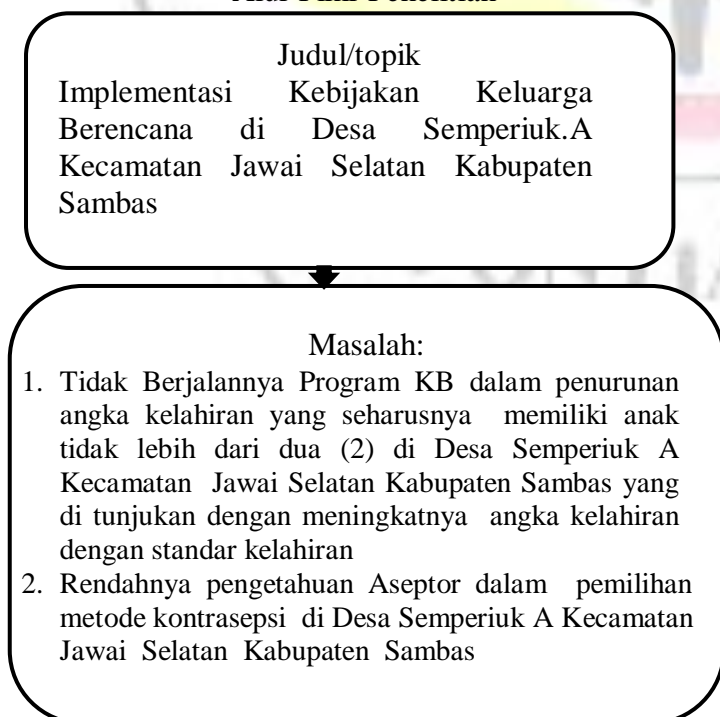
Menurut Charles O. Jones dalam (Widodo 2006,90) Tahapan interpretasi merupakan tahapan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*). Kebijakan umum atau strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama

antar lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (bupati atau walikota) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

3. Tahapan Aplikasi

Menurut Charles O. Jones dalam (Widodo 2006, 94) Tahapan aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitasnya. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel 2.4
Alur Pikir Penelitian



SriWahyuni, NIM.E1012161087

Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura



Teori Proses Implementasi Charles O. Jones
 1. Pengorganisasian
 2. Interpretasi (Interprestation)
 3. Aplikasi (application)



Output
 Tergambarnya Proses Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menurut Moleong (2016:11) bahwa penelitian deskriptif adalah data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan hal-hal yang terjadi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, fenomena serta proses dari subjek dan objek penelitian di Desa Semperiuk a Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan implementasi kebijakan keluarga berencana.

Adapun subjek penelitian penulis adalah terdiri dari:

1. Kepala Desa Semperiuk A
2. DP3AP2KB
3. Kepala Polindes (Bidan)

4. Petugas PLKB kecamatan jawai selatan
5. SUB PPKBD
6. Masyarakat Desa Semperiuk A

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan keluarga berencana di Semperiuk A Kecamatan Kabupaten Sambas. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik keabsahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, adapun alasan atau asumsi peneliti untuk memakai triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data ialah, sebagian besar analisis yang dikaji mendapat dukungan data DP3AP2KB, PLKB, SUB PPKBD dan masyarakat Semperiuk A.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan verifikasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai proses implementasi kebijakan keluarga berencana di desa semperiuk A kecamatan jawai selatan kabupaten sambas

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

Menurut Jones (1996 :311) organisasi merupakan perhatian paling penting karena dapat dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan, Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang di rancang.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengorganisasian yaitu :

a. Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil wawancara melalui kasi DP3AP2KB sebagai salah satu pelaksana kebijakan yang bertugas dalam melakukan sosialisasi dan pelayanan kepada anggota keluarga berencana dalam hal ini DP3AP2KB melakukan sosialisasi melalui petugas PLKB dan bidan yang ada, pelayanan yang dilakukan oleh DP3AP2KB ini bertujuan untuk mengajak ikut program KB yang MKJP. Sementara itu Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala polindes (bidan) pelaksana kebijakan KB bertugas sebagai satu pelaksana kebijakan KB yang bertugas sebagai penanggung jawab atas masyarakat yang ikut KB, selain itu sebagai pelaksana dari kebijakan yang bertugas sebagai pelayanan, pembinaan

dan pelaksana siapa yang aktif dalam ber KB selain dari DP3AP2KB dan bidan. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PiLKB bahwa tugas PLKB dilapangan bekerjasama dengan bidan dan PPKBD untuk mengajak masyarakat ikut dalam kebijakan ber KB.

Implementor Pelaksanaan keluarga berencana dalam menjalankan pembinaan dan pelayanan sudah berjalan dengan baik.

b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara ketiga instansi DPAPKB, petugas PLKB, dan kepala Polindes(Bidan) bahwa yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan keluarga berencana ini lebih mengarah kepada peraturan pemerintah sebagai implementor dalam kebijakan keluarga berencana di desa semperiuik a dan dapat di kerjakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peodoman kebijakan yang menjadi tuntutan atau referensi sedangkan mengenai SOP dalam pelaksnaanya tugasnya hanya selaku implementor kebijakan keluarga berencana.

Standar operasi onal dan prosedur kebijakan keluarga berencana dalam tiga instansi sudah terlaksana dengan baik seperti dalam peraturan pemerintah.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

a. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Hasil wawancara dengan petugas PLKB dari DP3AP2KB, kepala polindes dari tiga lembaga terkait anggaran dana untuk pelaksanaan kebijakan keluarga berencana tersebut bahwa anggran khusus pelaksanaan kebijakan KB tersebut dari dana alokasi khusus serta dana alokasi umum dan untuk bidan tidak ada anggaran .

Dari jabaran di atas bahwa pemerintah harus memberikan anggaran khusus untuk keluarga berencana tersebut agar berjalan dengan baik

b. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana atau alat penunjang yang diperlukan dalam implementasi sebuah kebijakan secara optimal peralatan yang diperlukan meliputi gedung kantor kendaraan yang dibutuhkan dalam sosialisasi dan pembinaan kebijakan baik itu roda dua maupun roda empat.

Untuk kebijakan KB sumber daya peralatan juga di perlukan seperti alat kontrasepsi gratis demi menunjang berjalannya kebijakan keluarga berencana tersebut.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Hasil Dari wawancara DP3AP2KB, BIDAN, PLKB dan sub PPKBD dapat disimpulkan bahwa di dalam manajemen pelaksanaan kebijakan keluarga berencana semua berkoordinasi dan bekerja sama antara tiga implementor dan PPKBD. Sistem pelaksanaannya menggunakan pola kologial dan melibatkan lebih dari satu lembaga. Untuk dinas DP3AP2KB dan petufgas PLKB sudah ada koordinasinya dan (PPKBD) pembantu keluarga berencana desa belum ada.

Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan keluarga berencana sudah berjalan dengan baik

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari tiga implementor, kasi DP3AP2KB petugas PLKB, kepala Polindes (bidan) sudah ada jadwal khusus pelaksanaan kebijakan keluarga berencana, selain itu jadwal yang mereka gunakan adalah sistem perbulan sekali ataupun 3 bulan sekali atau setiap minggu sekali di poskesdes semperiuk a.

Penetapan jadwal kegiatan belum terlaksana dengan baik karena masyarakat masih ada yang belum paham dengan kebijakan KB jadi seharusnya pelaksanaannya dilakukan 2 minggu sekali

agar masyarakat paham pentingan melakukan KB.

2. Interpretasi

Sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuan apabila terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar implementor kebijakan maupun sasaran kebijakan pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor penentu kebijakan berhasil atau tidak dalam mencapai suatu tujuan.

1. Pemahaman kebijakan keluarga berencana

Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan. sulit untuk mencapai tujuan dari kebijakan apabila implementor tidak memahami kebijakan dan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke tiga implementor kasi KB DP3AP2KB, PLKB, BIDAN bahwa implementor di tingkat daerah DP3AP2KB sudah memahami secara mendalam tentang kebijakan keluarga berencana jadi dari bidan subppkbd dan petugas PLKB sudah memahami isi dan tujuan kebijakan keluarga berencana dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat selaku pelaksana dari kebijakan keluarga berencana mereka hanya mengetahui dan

memahami kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, banyak dari mereka juga yang tidak patuh dengan kebijakan keluarga berencana dan banyak juga yang mengikuti kebijakan tersebut tetapi dari pihak implementor tetap memberikan sosialisasi, pembinaan serta koordinasi yang efektif kepada masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi yaitu iud, spiral, kondom, mop dan mow serta spiral antar lima implementor yang saling terkait sehingga membuat kebijakan merupakan keberhasilan dalam kebijakan keluarga berencana tersebut.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, Sosialisasi sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Tujuan pemberian informasi ini agar kelompok sasaran dapat memahami kebijakan yang akan di implementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah akan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tujuan kebijakan sosialisasi dapat dilakukan secara langsung dengan cara dilakukannya pertemuan antara implementor kebijakan serta pihak pihak yang terkait yaitu masyarakat dan jajaran pemerintah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketiga implementor pemerintah daerah serta masyarakat selaku sasaran kebijakan keluarga berencana sangat mendukung adanya kebijakan ini. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi paham dan mendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini apalagi berkaitan dengan keluarga berencana, jadi harap dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah dapat berupaya lagi dalam memberikan dukungan keluarga berencana.

3. Aplikasi

Tahap aplikasi (dalam widodo,2010:94) merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

a. Pelaksanaan penerapan kebijakan keluarga berencana

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang keluarga berencana :

Hasil dari wawancara dengan DP3AP2KB, Bidan, dan PLKB dalam pelaksanaannya sudah menjalankan seoptimal mungkin ini ditandai dengan pada tahun 2017 sudah melaksanakan kebijakan keluarga berencana melalui MKJP. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa masing masing pihak sudah

melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaksanaannya pun sangat efektif

b. Kendala dan pelaksanaan terhadap keluarga Berencana

Berdasarkan wawancara dengan ketiga implementor serta masyarakat selaku pelaksana kebijakan keluarga berencana dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi suntik dan pil sangat lah mudah karena terjangkau oleh masyarakat. Dengan lebih aktif memberikan pelayanan, sosialisasi dan pembinaan dalam memberikan kebijakan keluarga beencana serta dapat mmfasilitasi dari segi alat kontrasepsi dan prasarana dan juga peran masyarakat dalam berkontrasepsi dan merupakan pengaruh besar dalam memberikan dukungan serta menjalankan proses implemetasi kebijakan keluarga berencana di desa semperiuk A ini agar dapat berjalan dengan baik serta dapat bersama sama mewujudkan keluarga kecil keluarga sejahtera dan mejadi desa aman dan tentram dan bahagian.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah di kemukakan peneliti maka, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dan pembahasan tersebut yaitu :

1. Tahap pengorganisasian dalam implementasi kebijakan keluarga berencana di desa semperiuk A kecamatan Jawai selatan kabupaten sambas belum efektif dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Dalam pelaksanaan kebijakan kurangnya pembinaan ,pelayanan,dan sosialisasi dari ketiga implementor, yaitu : DP2AP3KB kasi KB,Bidan Poskesdes, dan PLKB jawai selatan .
- b. Untuk Stsndar Operasional (SOP) sendiri telah adanya SOP yang mengatur tentang waktu prosedur dalam pelaksanaan kebijakan untuk tugas dari masing masing implementor tersebut
- c. Sumberdaya keuangan sendiri ini berasal dari DAK dan DAU yang berupa alat kontrasepsi dan juga ada sumber daya peralatan yang telah di sediakan.
- d. Untuk penetapan manajemen dalam pelaksanaan kebijakan terdapat masih kurangnya koordinasi antara ketiga belah pihak DP2AP3KB, Petuga PLKB dan bidan di desa tersebut
- e. Untuk penetapan jadwal kegiatan tersebut dalam pelaksanaan blm ada jadwal rutin untuk DP2AP3KB untuk bidan juga blm ada jadwal

rutin tp sudah dilakukan kadang 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung dan Untuk plkb sendiri sebulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung diadanya pelaksanaan .

2. Untuk Tahap interpretasi pada implementasi kebijakan keluarga berencana di desa Semperiuk A masih kurang Optimal

a. Pemahaman isi dan tujuan tentang ketiga implementor keluarga berencana sudah memahami tetapi masyarakat belum atau kurang dalam memahami dengan isi dan tujuan tersebut .

b. Sosialisasi sudah dilakukan oleh dinas DP2AP3KB tapi tidak rutin sosialisasi ini dilakukan supaya pelaksanaan dari kebijakan keluarga berencana tersebut berjalan lancar dengan efektif namun kenyataannya dilapangan masih aja ada masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi .

3. Tahap aplikasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan keluarga berencana di desa semperiuk a belum optimal dikarenakan :

a. Dalam penerapan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dari DP2AP3KB, Bidan dan juga petugas PLKB namun hasil yang diperoleh sejauh ini pelayanan pembinaan dan sosialisasi dalam pelaksanaan masih

belum efektif yang dilihat dari masih banyak nya angka kelahiran yang melebihi standar dan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk malakukan KB cukup rendah.

b. Untuk penyediaan sarana dan prasarana belum cukup memadai karena belum adanya dana khusus untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas peneliti bermaksud memberikan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan ataskekurangan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan keluarga berencana sebagai berikut:

a. Organisasi

Diharapkan pemerintah daerah kabupaten sambas juga ikut berperan dalam menjalankan implementasi kebijakan keluarga berencana dengan cara memberikan segala fasilitas untuk pemenuhan hak keluarga berencana agar menambah dukungan masyarakat .

b. Interpretasi, Diperlukan turunan kebijakan seperti peraturan daerah terkait implementasi kebijakan keluarga berencana agar dalam pelaksanaanya dengan jelas siapa yang menjadileading sector atau yang ditunjukan sebagai

penanggung jawab atas kebijakan tersebut .

c. Aplikasi

Melakukan jadwal pembinaan dan sosialisasi secara rutin 1 bulan sekali dengan waktu dan tanggal yang berbeda.

3. Keterbatasan Peneliti

Ada beberapa hal dalam Keterbatasan untuk melakukan penelitian implementasi kebijakan keluarga berencana di desa semperiuik a

1. Kesulitannya untuk mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat atau keluarga yang ikut dlam keluarga berencana dikarenakan permasalahan ini bersifa privasi dan sangat sensitif untuk di bicarakan.
2. Kurangnya keterampilan dalam peneliti dalam merangkai kalimat dalam penelitian yang menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pemikiran – pemikiran kedalam bentuk tulisan selain itiu kurangnya pengalaman peneliti karena masih tergolong baru atau permula dalam melakukan penelitian ilmiah sehingga dalam kelemahan tersebut membuat peneliti mengalami kesulitan dalam melaksanakan wawancara ,teknik pengumpulan data dan analisis data .

3. Pada saat dilapangan untuk melakukan wawancara peneliti sedikit kesulitan umntuk bertemu dengan beberapa implementor karena lokasi peneliti yang cukup jauh terkadang ketika peneliti ke lokasi implementor tidak ada di tempat .

F. DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, Khutbah Jum'at 2018. *Keluarga Berencana Berkualitas*. Pontianak : Provinsi Kalimantan Barat
- BKKBN, Kesehatan Reproduksi 2017. *Aman Dan Sehat Menggunakan Kontrasepsi*. Jakarta: Perwakilan Provinsi Kalimantan barat
- BKKBN, Jakarta 2011. *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Persalinan (Jampersal)*
- Deddy, Mulyadi,2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*: Bandung : Alfabeta
- Edi Suharto,2010. *Analisis Kebijakan Publik. (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*.Bandung :Alvabeta
- Hartanto, Hanafi. 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta : Pusaka Sinar Harapan
- Irianto, Koes 2015. *Kesehatan Reprodukdi teori dan Praktikum*. Bandung:Alfabeta
- Leo Agustino,2012. *Dasar – dasar kebijakan publik*.bandung : Alfabeta

Moleong, J, Lexy.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya

Subarsono, 2005. *Analisis kebijakan publik (konsep teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : pustaka pelajar

Sahya Anggara,2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Cv Pustaka Setia

Sugiyono 2009. *Metode Penelitian Administrasi(Metode R dan D) Cv Bandung*. Alvabeta

————— 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D Cv Bandung*. Alvabeta

————— 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D Cv Bandung*. Alvabeta.

Widodo Joko,2010. *Analisis Kebijakan Publik.(Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Cetakan ke3 september 2010. Bayumeda Publishing

Winarno, Budi. 2002. *Teori Proses Kebijakan Publik. Media Presindo Yogyakarta*

Dokumentasi Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem informasi Keluarga

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

Undang- undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)

Skripsi :

Zaeni,Ahmad. 2018 diKampus Ponegoro Semarang dengan judul penelitian Implementasi kebijakan program keluarga berencana dikabupaten batang studi kasus peningkatan kesertaan KB di Kecamatan Grinsing

Jurnal:

Hery Aryanti dan Luh Seri Ani 2014 Faktor- faktor yang berhubungan dengan penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Kawin UsiaDini di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur''. Diambil pada tanggal 07 february 2019 pukul 20:24 WIB.dari <https://pernikahan-dini-1.blogspot.com/2011/05/faktor-faktor-pernikahan-dini.html>